

SOSIALISASI DIPLOMASI DAERAH DALAM UPAYA MENGOPTIMASI SUMBER-SUMBER LUAR NEGERI

Windy Dermawan^{1*}, RMT Nurhasan Affandi², Ivan Darmawan³

^{1,2}Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran

³Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

*Korespondensi: windy.dermawan@unpad.ac.id

ABSTRAK. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan kegiatan sosialisasi mengenai diplomasi daerah sebagai upaya mengoptimasi sumber-sumber luar negeri oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Diplomasi daerah oleh Pemerintah Kabupaten Bandung menjadi penting dilakukan dalam upaya memanfaatkan sumber-sumber luar negeri bagi kebutuhan daerah. Namun, diplomasi daerah masih terbatas dilakukan sehingga Pemerintah Kabupaten Bandung masih memanfaatkan sumberdaya lokal dan nasional untuk mencapai pembangunannya sehingga diperlukan sosialisasi mengenai diplomasi daerah bagi kalangan Pemerintah Kabupaten Bandung. Metode yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah pendidikan masyarakat melalui penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman mengenai diplomasi daerah dan konsultasi untuk merespon dan mendiskusikan kebutuhan Kabupaten Bandung. Kegiatan ini telah membuka wawasan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk menyadari pentingnya kegiatan diplomasi dalam upaya mencari sumber-sumber luar negeri dan mengembangkan sumber-sumber dalam negeri untuk mengoptimasi pembangunan daerah. Namun, disadari bahwa kegiatan diplomasi daerah memerlukan pengkajian dan pengembangan sumber-sumber luar negeri, sarana dan perangkat yang diperlukan untuk mengakses sumber-sumber luar negeri, kapasitas dan kapabilitas dari pemangku kepentingan dalam berdiplomasi. Kegiatan ini berhasil membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan di jajaran Pemerintah Kabupaten Bandung.

Kata kunci: Diplomasi Daerah, Kepentingan Daerah, Pemerintah Daerah, Sumber-Sumber Luar Negeri, Sosialisasi.

ABSTRACT. This paper aims to describe socialization activities regarding region diplomacy as an effort to optimize foreign sources by the Government of Bandung Regency. Region diplomacy by the Government of Bandung Regency is important in an effort to utilize foreign sources for regional needs. However, region diplomacy is still limited so that the Government of Bandung Regency still utilizes local and national resources to achieve its development, so socialization regarding region diplomacy is needed for the Government of Bandung Regency. The method used to achieve this goal is public education through counseling to increase understanding of region diplomacy and consultation to respond to and discuss the needs of Bandung Regency. This activity has opened the Bandung Regency Government's horizons to realize the importance of diplomatic activities in seeking foreign sources and developing domestic sources to optimize regional development. However, it is realized that region diplomacy activities require assessment and development of foreign sources, facilities and tools needed to access foreign sources, capacities and capabilities of stakeholders in diplomacy. This activity succeeded in bringing benefits to stakeholders in the ranks of the Government of Bandung Regency.

Keywords: Region Diplomacy, Local Government, Foreign Sources, Socialization, Regional Interests.

PENDAHULUAN

Kompleksitas hubungan luar negeri dengan persoalan yang melingkupinya telah mendorong beragam aktor untuk berinteraksi melintasi batas-batas negara. Tantangan dalam pemanfaatan sumber-sumber global pun tidak dapat dipungkiri menjadi kebutuhan dan kepentingan, tidak hanya bagi pemerintah nasional (Republik Indonesia), tetapi juga

pemerintah subnasional (Pemerintah Daerah). Hal ini sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan dan kepentingan publik dalam pembangunan daerah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Tuntutan pemerintah daerah untuk berkiprah di luar negeri, selain didorong karena terbatasnya peran negara dalam mengoptimasi pembangunan di daerah (Keating, 2013), juga karena kebutuhan daerah untuk memanfaatkan sumber daya alternatif di

luar negeri secara kompetitif demi kepentingan daerahnya (El-Dessouki, 2018; Mukti, 2015). Aktivitas hubungan luar negeri pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan dari pemerintah pusat (Hocking, 1999), namun demikian, beberapa pemerintah daerah telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan daerahnya dalam fora internasional tanpa bimbingan atau dukungan dari pemerintah pusat (Jain, 2005). Aspek-aspek yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan aktivitasnya di luar negeri menyangkut perihal ekonomi, politik dan kerjasama (Grydehøj, 2014; Pietrasiak et al., 2018; Rodrigues & Mattioli, 2017; Tavares, 2016). Aktivitas inilah yang memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan relasi dengan aktor luar negeri (Chatterji & Saha, 2017).

Munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 mengenai Kerja Sama Daerah telah menjadi salah satu kerangka bagi daerah untuk melaksanakan otonominya. Pada konteks ini, pemerintah daerah menjadi aktor sentral di dalam memperluas perdagangan dan mencari peluang investasi asing bagi negara dan daerahnya (Kuznetsov, 2015; Tavares, 2016). Sehingga, diplomasi daerah dapat menjadi instrumen aktor subnegara untuk mempromosikan kepentingan ekonomi daerah yang lebih luas di level global (Aguirre & Bojórquez, 2018; R. M. Alvarez & Hall, 2017; Mendes & Figueira, 2017).

Jawa Barat sebagai salah satu aktor subnegara telah menjalankan aktivitas luar negeri yang disebut sebagai diplomasi daerah. Diplomasi daerah sebagai aktifitas dan atau proses dimana daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, terlibat dalam hubungan luar negeri dengan aktor di panggung politik internasional dengan tujuan merepresentasikan daerahnya serta kebutuhan sekaligus kepentingan satu sama lain (Crikemans, 2008; Keating, 2013). Hirauan Jawa Barat untuk melaksanakan hubungan luar negeri daerah diperkuat pula oleh munculnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

Namun, penerapan diplomasi daerah di Jawa Barat masih belum merata secara luas dan

berimbang. Hal ini dapat disebabkan oleh pemahaman daerah atas sumber-sumber luar negeri—yang relevan bagi kebutuhan daerah—masih terbatas. Selain itu kesiapan institusional pemerintah, hingga kesiapan sosial pun relatif terbatas. Oleh karena itulah, kegiatan sosialisasi mengenai Kediplomasi Daerah menjadi penting untuk dilakukan. Hal ini sebagai upaya untuk menggugah hirauan para pemangku kepentingan di lingkup Jawa Barat terhadap probabilitas atau posibilitas kediplomasi daerahnya. Kepedulian ini diharapkan dapat terolah proporsional antara pandangan kedalam (*inward looking*) dengan pandangan keluar (*outward looking*) daerah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dalam berbagai media. Hal ini juga didorong terutama ketika jarak lokal dan global ataupun batas subnasional dan transnasional melebur hingga internasional dan domestik bagaikan intermestik. Saat ini, tidak hanya aktor pemerintahan, organisasi dan korporasi, tetapi juga aktor sosial, publik atau komunitas, bahkan individual di dunia ini yang memungkinkan untuk saling berinteraksi.

Komponen utama yang hendak disaji pada kegiatan sosialisasi ini adalah diplomasi, khususnya dalam fungsi yang lebih luwes dan beragam dibandingkan dengan hanya sebatas mengantar kepada hubungan dan atau kerja sama luar negeri daerah belaka. Diplomasi patut disadari secara kontemporer yakni yang tidak lagi memusat pada negara-bangsa (*state centric*). Sosialisasi ini juga turut menggali turunan diplomasi di lingkup ‘diplomasi kultural’ hingga ‘diplomasi publik’ serta mendalami turunannya pada ranah *region* (daerah makro, daerah mikro, provincial, municipal) termasuk Paradiplomasi.

Sosialisasi yang hendak diselenggarakan bermaksud untuk mengenali perihal apa saja yang patut/perlu dan dapat diusahakan Jawa Barat sebagai aktor global. Identifikasi ini meliputi (1) Pengkajian dan pengembangan sumber-sumber luar negeri untuk membantu pembangunan daerah; (2) Pembahasan jalan atau cara dengan turut meliputi sarana dan perangkat yang dibutuhkan guna mengakses mancanegara; serta (3) Pembahasan kapabilitas dan kapasitas yang penting supaya daerah-daerah di Jawa Barat memiliki peluang memetik manfaat global semungkinnya. Tiga unsur inilah yang hendak

didiskusikan sehingga diharapkan aktor daerah dapat bersama-sama memperoleh manfaat dari diplomasi daerah dan pengembangannya oleh lembaga riset dan pengembangan. Berdasarkan paparan tersebut, kegiatan sosialisasi ini bertujuan meninjau pemikiran, pemodelan, strategi, serta kebijakan yang faktual ataupun potensial bagi daerah-daerah di Jawa Barat untuk merintis dan mengembangkan kediplomasiannya.

METODE

Metode dalam kegiatan sosialisasi ini adalah pendidikan masyarakat dan konsultasi. Pada konteks pendidikan masyarakat, kegiatan dilakukan sebagai upaya penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman pada aspek hukum, sosial dan politik mengenai diplomasi daerah. Hal ini meliputi tiga unsur materi, diantaranya kebutuhan dan sumber-sumber global, pemikiran dan pemodelan diplomasi daerah, termasuk didalamnya mengenai jalan atau cara dan sarana dan perangkat dalam kediplomasi daerah, dan mengenai kapabilitas kelola dan kapasitas bertindak bagi aktor daerah dalam melakukan diplomasi. Konsultasi dilakukan untuk merespon dan mendiskusikan persoalan atau kebutuhan daerah yang didasarkan pada kerjasama dan kemitraan dengan perguruan tinggi. Terkait materi sosialisasi dan sebagai pendahuluan dalam pengumpulan data yang diperlukan pada kegiatan PPM ini, maka hal ini diperoleh dari wawancara terhadap informan yang relevan di bidang diplomasi daerah, studi dokumentasi mengenai diplomasi daerah, termasuk penggalan terhadap kebutuhan dan kepentingan daerah dalam melakukan diplomasi, aspek legal formal yang mendukung kediplomasi daerah, kemudian observasi terhadap beberapa perangkat daerah yang memiliki kaitan dalam partisipasinya sebagai diplomasi daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PPM ini dilaksanakan pada dua subkegiatan, diantaranya identifikasi (belanja) masalah melalui survai terhadap lembaga daerah dan wawancara terhadap pemangku kepentingan yang relevan, dan kegiatan pendidikan masyarakat melalui penyuluhan serta kegiatan konsultasi terhadap lembaga daerah, khususnya Pemerintah

Kabupaten Sumedang. Berikut ini dipaparkan kegiatan-kegiatan tersebut.

Identifikasi (Belanja) Masalah mengenai Diplomasi Daerah

Pada bagian ini, kami sebagai tim PPM melaksanakan identifikasi mengenai diplomasi daerah. Hal ini melingkupi kondisi eksisting dari lembaga-lembaga di daerah dan segenap pemangku kepentingannya mengenai pemahamannya terhadap diplomasi daerah. Pada kegiatan ini, kami melakukan survai dan wawancara terhadap beberapa pemangku kepentingan di daerah dari beberapa lokasi, diantaranya Injabar Kota Bandung, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Cimahi, Bappeda Kabupaten Garut, Bappeda Kota Depok. Berdasarkan survai dan wawancara terhadap sejumlah informan yang ada di lembaga-lembaga tersebut, dapat dipetik hasil bahwa terdapatnya kebutuhan daerah terhadap sumber-sumber global. Daerah masih memanfaatkan sumber-sumber domestik yang terdapat pada sumber nasional (APBN) dan sumber lokal (APBD) di daerah itu sendiri, sehingga keterbatasan tersebut dimungkinkan membatasi optimasi pencapaian pembangunan daerah. Namun, daerah pun masih terbatas pengetahuannya terhadap sumber-sumber global tersebut. Hal ini yang berkaitan dengan eksplorasi kami terhadap kapabilitas daerah dalam mengelola sumber-sumber daya yang ada, khususnya sumber-sumber global, serta kapasitas daerah dalam bertindak.

Kapasitas di sini terkait dengan kemampuan sumberdaya aparatur sipil negara (ASN) di daerah dalam bertindak sebagai agen diplomat bagi daerahnya. Keterbatasan kompetensi ASN di dalam melaksanakan diplomasi menjadi salah satu sebab tidak optimalnya daerah di dalam menggali sumber-sumber global. Identifikasi sumber-sumber global ini pun perlu diketahui oleh unit perangkat daerah di Jawa Barat. Kemudian, perihal dimungkinkannya pengembangan sumber-sumber global perlu dikaji lebih lanjut dalam bentuk riset, kajian, studi yang berpotensi untuk menjadi *policy brief* sebagai salah satu referensi dalam perencanaan pembangunan daerah. Disini juga kami menangkap masalah bahwa riset-riset atau kajian-kajian yang dilakukan oleh lembaga riset dan pengembangan di daerah masih terbatas

recurring problem, yaitu masalah yang biasa muncul dan artifisial. Riset atau kajian mengenai pentingnya pemanfaatan sumber-sumber global dan kediplomasian daerah masih terbatas dilakukan. Bahkan, riset atau kajian yang dilakukan terkesan muncul karena adanya kebijakan yang ingin dijalankan, sehingga belum diarahkan pada pemanfaatan jangka panjang dari luaran riset atau kajian tersebut. Namun demikian, organisasi perangkat di daerah memandang bahwa diplomasi daerah penting untuk diketahui, dipahami dan mampu dilaksanakan agar dapat mengoptimasi sumberdaya yang ada untuk pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil survai lapangan dan wawancara, ditemukan bahwa perihal kediplomasian daerah masih terasa asing dan terbatas informasinya di masyarakat. Padahal, hal ini diperlukan bagi pembangunan daerah. Keterbatasan pemahaman di masyarakat khususnya pada unsur aparatur sipil negara adalah karena pegawai pemerintah terbatas/dibatasi oleh regulasi maupun tugas pokok dan fungsinya yang bersifat administratif dan birokratis sehingga tidak dapat melakukan penelitian atau pengkajian mengenai isu yang relevan dengan pembangunan daerah secara optimal walaupun pegawai-pegawai tersebut ada yang memiliki kemampuan penelitian yang memadai. Selain itu, mereka juga takut untuk melakukan penelitian ataupun tugas lain di luar tupoksinya karena dianggap menyalahi aturan atau kewenangannya sehingga muncullan lembaga swasta sebagai mitra pemerintah dalam penelitian atau kajian. Berdasarkan masalah-masalah di atas, maka seyogianya pemerintah daerah dapat lebih proaktif dan intensif untuk bermitra dengan lembaga nonpemerintah atau perguruan tinggi. Tetapi pada kenyataannya, hal ini terbatas dilakukan, padahal perguruan tinggi atau lembaga nonpemerintah dimungkinkan memiliki kedekatan yang lebih dengan masyarakat dan mengetahui permasalahannya. Pemerintah harusnya lebih aware dalam memetakan program dan stakeholder terlebih. Perguruan tinggi memiliki kapasitas dalam melakukan penelitian atau kajian dan bisa sangat membantu kediplomasian daerah tetapi masih terbatas kesempatan dari pemerintah terhadap tawaran kerjasama kajian ini.

Penyuluhan dan Konsultasi mengenai Kediplomasian Daerah

Setelah kami melakukan kegiatan mengenai identifikasi masalah mengenai diplomasi daerah yang memuat tiga unsur, yaitu kebutuhan daerah dan sumber global, pemikiran dan pemodelan diplomasi daerah, kapabilitas kelola dan kapasitas bertindak, kegiatan selanjutnya adalah penyuluhan dan konsultasi mengenai kediplomasian daerah. Kegiatan ini merupakan bentuk dari pendidikan masyarakat yang dilakukan terhadap pemerintah daerah, yang dalam hal ini kami lakukan terhadap jajaran ASN pada pimpinan level pratama di Pemerintah Kabupaten Bandung.

Kegiatan ini sebagai bagian dari upaya kami di dalam berbagi informasi dan wawasan mengenai kediplomasian daerah, sekaligus memberi motivasi dan pembekalan terhadap pimpinan tinggi pratama di Kabupaten Bandung sebagai hasil dari penggalian mengenai identifikasi masalah mengenai diplomasi daerah. Pada kegiatan ini, kami melakukan berbagi informasi dan bertukar pikiran dalam bentuk ceramah dan diskusi mengenai kediplomasian daerah. Didapati bahwa Kabupaten Bandung tengah menjajaki hubungan luar negeri dengan Gimhae (Republik Korea), kemudian di tahun 2012, Kabupaten Bandung juga tengah menjajaki kerja sama dengan Go Seong (Republik Korea) yang masih pada tahap LoI (*Letter of Intent*). Hal tersebut masih terbatas tindak lanjutnya sehingga belum terdapat program yang diimplementasikan. Penandatanganan LoI tersebut menjadi bentuk awal kesepakatan kedua Kabupaten Bandung untuk menjalin hubungan kerja sama dalam beberapa bidang, mulai dari pengolahan lingkungan (seperti sumber daya air, pariwisata, dan infrastruktur) hingga pendidikan dan kebudayaan.

Pada kesempatan ini juga, kami menyampaikan perihal keutamaan *research-based policy* beracuan diplomatik dalam peningkatan kompetensi ASN yang berwawasan internasional. Kegiatan ini dilakukan tidak hanya secara formal, tetapi juga secara nonformal dalam beberapa kali pertemuan dengan pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung. Beberapa

pertemuan dilakukan sebagai upaya untuk menggali informasi dan berbagi pengetahuan dan data yang kami dapatkan pada kegiatan identifikasi masalah terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Di kesempatan ini juga, kami mendiskusikan bahwa diplomasi daerah yang dilaksanakan oleh Kabupaten Bandung dapat berlangsung dengan lebih efektif karena Kabupaten Bandung sebagai aktor kunci memiliki pemahaman yang lebih mendalam, spesifik, dan menyeluruh tentang masyarakat serta kebutuhan daerahnya. Dengan demikian, interaksi dan kegiatan hubungan serta kerja sama luar negeri daerah dapat difokuskan pada pembangunan di Kabupaten Bandung dari berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Harapan-harapan dari BKPSDM bahwa pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensinya mengenai kediplomasian daerah sehingga mampu mengoptimasi sumber-sumberdaya yang ada dengan pemanfaatan sumber-sumber global. Termasuk di dalamnya yaitu perlunya akademisi, pebisnis, komunitas, media dan pemerintah untuk bermitra di dalam kediplomasian daerah. Hal ini yang dinamakan dengan pentahelix. Namun demikian, tantangan dalam kemitraan ini adalah masih terdapatnya friksi, khususnya diantara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi, dimana kegiatan-kegiatan pemerintah daerah lebih bersifat praktis administratif, sementara kegiatan-kegiatan perguruan tinggi (akademisi) bersifat teoretik/konseptual, sehingga diharapkan dari kegiatan ini dimunculkan kajian-kajian kediplomasian daerah yang output maupun outcome nya dapat bermanfaat bagi pengembangan praktek kediplomasian di Pemerintah Kabupaten Bandung.

Berdasarkan hasil konsultasi, didapati bahwa penelitian dan pengembangan di Kabupaten Bandung tidak hanya mengoordinasikan penelitian dan kajian saja, namun secara ideal harus mampu menjadi basis bagi segala kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh daerah sehingga terdapat dasar akademik dari kebijakan tersebut atau yang dikenal sebagai istilah *science based policy*. Hal tersebut merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN. Namun pada implementasinya selama ini lembaga

penelitian belum menjadi dasar bagi kebijakan-kebijakan yang dibuat, padahal fungsinya untuk memperkuat basis kebijakan. Jadi, pada saat ingin mengambil kebijakan jika ada dasar ilmiahnya maka akan lebih baik kebijakan tersebut. Bagi daerah, hal itu memang tidak mudah, terkadang tersandung oleh waktu dimana kebijakan harus segera dibuat tanpa didahului oleh suatu kajian terlebih dahulu. Hal ini juga terkait dengan faktor politik. Misalnya janji politik dari pimpinan daerah yang harus segera direalisasikan tanpa melihat apakah sudah terdapat kajiannya ataukah belum. Dalam hal ini tidak mungkin menunggu riset terlebih dahulu baru dibuat kebijakan, terkadang dibuat kebijakan terlebih dahulu. Namun jika dilihat pada peraturan, semua yang namanya kegiatan atau program harus ada dasar analisisnya yang dibuat oleh pejabat struktural mengenai analisis tersebut. Hal ini merupakan cikal bakal riset, harus terdapat alasan dibuatnya kegiatan tersebut, tujuan, jangka waktu, biaya dan jumlah personil yang diperlukan. Inilah yang mendasari mengapa suatu kegiatan atau program harus dilakukan.

SIMPULAN

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah mendapatkan tantangan kondisi kekinian dimana peningkatan kebutuhan terhadap sumber-sumberdaya alternatif bagi pembangunan daerah menjadi hal yang penting didapatkan. Kendati demikian, kesadaran yang tinggi terhadap sumberdaya alternatif tersebut masih belum diimbangi oleh kapasitas bertindak dan kapabilitas kelola dari pemerintah daerah di Jawa Barat. Hal ini terlihat bahwa tidak semua pemerintah daerah di Jawa Barat menjalin hubungan dengan lembaga atau instansi di luar negeri. Kegiatan ini juga telah berhasil memberikan pengetahuan dan wawasan baru, menggugah dan mengajak sekaligus memacu para pemangku kepentingan di beberapa daerah di lingkungan Provinsi Jawa Barat, khususnya bagi para pimpinan tinggi pratama pada Pemerintah Kabupaten Bandung perihal kediplomasian daerah. Kegiatan ini juga semakin menyadarkan para pemangku kepentingan di lingkungan Provinsi Jawa Barat, khususnya Pemerintah Kabupaten Bandung bahwa diplomasi daerah penting dilakukan sebagai upaya optimasi pembangunan daerah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Padjadjaran yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini melalui program Hibah Riset Unpad TA 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguirre, K. M. N., & Bojórquez, G. C. (2018). Paradiplomacy and Economic Development in the Reynosa-McAllen cross-Border Region. *Estudios Fronterizos*, 19. <https://doi.org/10.21670/ref.1804004>
- Alvarez, M. (2020). The Rise of Paradiplomacy in International Relations. *E-International Relations*. <https://www.e-ir.info/2020/03/17/the-rise-of-paradiplomacy-in-international-relations/>
- Alvarez, R. M., & Hall, T. E. (2017). *Math Fix for Unfair Elections Physics Fix for Uninformed Voters*. 299(3).
- Chatterji, R., & Saha, S. (2017). Paradiplomacy: Concept and the Context. *India Quarterly*, 73(4), 375–394. <https://doi.org/10.1177/0974928417731638>
- Criekemans, D. (2008). Are the boundaries between paradiplomacy and diplomacy watering down? Preliminary findings and hypotheses from a comparative study of some regions with legislative power and small states. In *2nd Global International Studies Conference: "What keeps us apart, what keeps us together? International order, justice and value."*
- El-Dessouki, A. (2018). Domestic structure and sub-national foreign policy: an explanatory framework. *Review of Economics and Political Science*, 3(3/4), 102–118. <https://doi.org/10.1108/rep-10-2018-008>
- Grydehøj, A. (2014). Goals, Capabilities, and Instruments of Paradiplomacy By Subnational Jurisdictions. *Local Actions in a Global Context: Paradiplomacy by Subnational Jurisdictions*.
- Jain, R. K. (2005). India, The European Union and Asian Region. *Asia-Pacific Journal of EU Studie*, 3(1), 29–44. http://keusa.or.kr/korean/kor_publication/APJournal/2005_No3/Eu-3-3
Rajendra K Jain.pdf
- Keating, M. (2013). Regions and International Affairs: Motives, Opportunities and Strategies. In F. Aldecoa & M. Keating (Eds.), *Paradiplomacy in Action: The Foreign Relations of Subnational Governments* (1st ed.). Routledge.
- Kuznetsov, A. S. (2015). *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational governments in international affairs*. Routledge.
- Mendes, M. V. I., & Figueira, A. R. (2017). Paradiplomacy and the international competitiveness of cities: The case of Rio de Janeiro. *Revista Brasileira de Política Internacional*, 60(1), 1–19. <https://doi.org/10.1590/0034-7329201700103>
- Mukti, T. A. (2015). Paradiplomacy: Bangkitnya Aktor Lokal di Fora Internasional. *The Politicss: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanudin*, 1(1), 85–94.
- Pietrasiak, M., Bywalec, G., Kamiński, T., Mierzejewski, D., Słowikowski, M., & Kamiński, T. (2018). Paradiplomacy – Discourse Analysis and Research Conceptualization. In *Paradiplomacy in Asia. Case studies of China, India and Russia*. <https://doi.org/10.18778/8088-615-5.02>
- Rodrigues, G. M. A., & Mattioli, T. (2017). Paradiplomacy, Security Policies and City Networks: the Case of the Mercocities Citizen Security Thematic Unit. *Contexto Internacional*, 39(3), 569–587. <https://doi.org/https://doi.org/10.1590/s0102-8529.2017390300006>
- Tavares, R. (2016). *Paradiplomacy: Cities and States as Global Players*. Oxford University Press.